

Artikel Ironi pada Masa Pandemi

by Gusmaniarti Gusmaniarti

Submission date: 06-Mar-2023 10:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2029823561

File name: artikel_pena_gusma.pdf (488.17K)

Word count: 1179

Character count: 7878

Ironi pada Masa Pandemi

Rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah mencederai amanat UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan undang-undang. Ini tentu ironi sementara pendidikan masih berjuang untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) guru dan tenaga pendidikan, peningkatan mutu lulusan, mencegah anak putus sekolah, pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan sinkronisasi kurikulum dengan perkembangan zaman. Apalagi ekonomi tidak sedang baik dihantam pandemi COVID-19. Ini semua perlu mendapat perhatian negara.

PPN jasa pendidikan sebesar 5 sampai 12 persen akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Beban itu akan ditanggung masyarakat. Bila

pendidikan mendapat beban secara akumulatif akan memberatkan pada peserta didik dan satuan pendidikan. Saat ini tanpa pajak saja, anak putus sekolah masih tinggi. Bagaimana apabila ditambah pajak tentu akan lebih banyak anak yang putus.

Pemerintah menyebut pajak hanya untuk sekolah komersial. Persentase sekolah komersial sangat kecil. Hanya berada di kota-kota besar saja. Dengan demikian, pajak dari sekolah tidak besar. Kebijakan ini justru akan mengarah pada komersialisasi sekolah.

Untuk sekolah tingkat SD dan SMP negeri tidak dipungut biaya pendidikan. Sedangkan untuk SMA negeri sederajat ada pungutan biaya pendidikan. Hanya di kabupaten dan kota tertentu saja SMA negeri sederajat yang tidak dipungut biaya. Jumlahnya sangat kecil. Sedangkan sekolah-sekolah swasta kecil

Gusmaniarti, S.Pd., M.Pd.

Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya



FOTO: SJAKRON

yang tersebar di seluruh pelosok daerah membutuhkan biaya dari masyarakat. Itu pun tidak besar dan cukup untuk gaji guru dan tenaga kependidikan. Bila sekolah-sekolah di pelosok ini dikenakan pajak 5 persen, masyarakat akan mendapat tambahan biaya pendidikan.

Biaya pendidikan saat ini ada

kesenjangan. Ada yang gratis ada yang bayar. Yang gratis ini peserta didik sulit masuk yaitu sekolah-sekolah negeri, karena dayaampungnya terbatas. Sedangkan yang bayar ada yang mudah dan ada yang sulit. Yang mudah adalah sekolah-sekolah kecil di kota dan pelosok desa. Sedangkan yang bayar tapi peserta didik sulit masuk adalah sekolah-sekolah *high quality* di kota-kota besar.

Jumlah sekolah kecil lebih banyak dari sekolah negeri dan sekolah swasta mahal. Sekolah swasta kecil banyak peserta didik dari kalangan tidak mampu seperti pekerja informal. Meskipun untuk orang yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan biaya, tapi tidak mudah. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah swasta ini sangat membantu pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan bangsa.

Maka mestinya sekolah digratiskan agar semua warga Negara bisa memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. Kalaupun tidak gratis, perbanyaklah beasiswa. Bukan malah mengenakan pajak. Perbanyaklah beasiswa untuk anak-anak berotak encer dan anak-anak tidak mampu agar kualitas SDM meningkat.

PPN jasa pendidikan tidak hanya menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan, tapi juga bisa mematikan satuan pendidikan karena ketidakmampuan masyarakat untuk membayar sekolah. Jika banyak sekolah yang tutup itu menjadi persoalan bagi pemerintah. Jika tingkat pendidikan warga negara rendah akan menjadi beban negara, karena banyak SDM berkualitas rendah. Mereka tidak bisa bersaing tidak hanya dalam skala global, tapi juga regional. (S)

Banyak Sekolah Swasta Kesulitan Bertahan

PPN pendidikan akan lebih memberatkan beban orangtua siswa. Tanpa adanya pajak saja orangtua siswa sudah merasa berat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, apalagi ditambah beban pajak dari pemerintah.

Bukan tidak mungkin setelah diberlakukan PPN pendidikan SPP sekolah swasta dinaikkan. Meskipun ada dana BOSREG/BOSDA, sekolah tetap butuh biaya untuk pengembangan pendidikan intra maupun ekstra, juga untuk kesejahteraan para pendidikannya.

Jika orangtua siswa kewalahan dengan biaya di sekolah swasta, akan banyak siswa *drop out* karena orangtuanya tidak mampu membiayai. Apalagi, untuk masuk sekolah negeri terkendala sistem, seperti

zonasi. Anak-anak yang prestasinya biasa-biasa saja akan sulit masuk sekolah negeri ketika tempat tinggalnya tidak dapat menjangkau sekolah negeri. Sehingga, mereka harus mencari sekolah swasta di dekat tempat tinggalnya.

Jika orangtuanya mampu, atau paling tidak mau berusaha mencari biaya anaknya untuk masuk sekolah swasta, mereka akan bisa melanjutkan sekolah dengan tenang. Akan tetapi, jika prestasinya biasa-biasa saja, tempat tinggal jauh dari sekolah tujuan, dan orangtuanya tidak punya biaya maka sulit bagi mereka untuk bisa melanjutkan sekolah.

Program wajib belajar 12 tahun wajib kita dukung agar pendidikan di Indonesia akan meningkat. Akan tetapi,

Dra. Suhartatik, S.Pd., M.Pd.

Guru SMP PGRI X Sidoarjo



FOTO: ISTIMEWA

jika pemerintah tidak bijak dalam menentukan kebijakan, sekolah swasta yang nota bene mitra pemerintah di bidang pendidikan, yang membantu pemerintah memenuhi kewajibannya menyediakan

fasilitas dan kesempatan belajar biasa-tujuan mencerdaskan anak bangsa, akan hancur.

Banyak sekolah, terutama sekolah swasta -- termasuk sekolah di bawah naungan PGRI -- sudah sulit bertahan pada masa pandemi yang berkepanjangan ini. Sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan sangat bergantung kepada orangtua siswa yang saat ini sangat terganggu kondisi ekonominya.

Sekolah tidak bisa memaksa mereka untuk memenuhi kewajibannya melunasi uang administrasi, seperti SPP, sebab sekolah menyadari kondisi saat ini. Akan tetapi, bisakah sekolah bertahan jika hal ini terus berlanjut? Kondisi semacam ini perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah benar-

benar memberlakukan PPN pendidikan.

Saat ini guru-guru swasta yang sudah masuk Dapodik bisa dikatakan agak lega karena bisa menikmati dana insentif dari pemerintah per triwulan, tetapi ada juga yang sudah beberapa tahun mengajar tidak bisa masuk Dapodik. Ini akan menghambat yang bersangkutan untuk bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh teman-temannya yang sudah dapat dana insentif tersebut.

Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan sekolah swasta mengingat begitu pentingnya peran sekolah swasta dalam turut serta mencerdaskan bangsa dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (gje)

Jangan Meliberalisasi Pendidikan

Rencana PPN pendidikan sangat tidak tepat karena masyarakat masih dihadapkan pada kesulitan dalam mengadaptasi pembelajaran dengan sistem baru akibat pandemi Covid-19. Para guru masih mencari solusi dalam pembelajaran daring agar menarik dan mudah dipahami.

Kalau lembaga pendidikan dikenai pajak, otomatis berpengaruh pada kenaikan pembayaran atau SPP sekolah. Padahal, masyarakat saat ini sedang banyak mengalami permasalahan ekonomi setelah adanya pandemi Covid-19.

Jika lembaga pendidikan dikenai PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Seharusnya

pemerintah hadir dengan kebijakan meringankan beban rakyat, bukan menyusahkan rakyat.

Pendidikan adalah hak asasi yang dijamin Undang-Undang, tak boleh diliberalisasi diserahkan pada mekanisme pasar. Negara harus hadir dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas.

Dampak penerapan PPN tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah dan membebani, serta kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi masa pandemi yang belum berakhir.

Perbedaan perlakuan antara guru yang mengajar di lembaga yang dinaungi

Mochammad Fuad Nadjib

Kepala SMK Diponegoro Sidoarjo



FOTO: ISTIMEWA

Kementerian Agama (Kemendikbudristek) dengan guru yang mengajar di lembaga yang dinaungi kemendikbudristek sudah menjadi problematika tersendiri yang harus dipikirkan

bersama terutama oleh para pemangku kebijakan, terutama masalah honorarium guru yang bermasalah dan dibawah standar.

Karena itu, negara harus kembali meninjau ulang agar sistem pendidikan kembali sesuai dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara, bahwa mendidik anak adalah mendidik warga. Artinya, pendidikan memiliki tanggung jawab utama dalam rangka mengembangkan anak didik sebagai warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya di tengah persoalan kebangsaan.

Pendidikan tidak boleh diliberalisasi dengan nilai

kewarganegaraan. Ini adalah momentum penting untuk duduk bersama mengevaluasi kembali sistem pendidikan selama ini, terutama yang berhubungan dengan tujuan melahirkan nilai kewarganegaraan.

Orientasi meningkatkan daya saing bangsa tetaplah dalam koridor meletakkan pendidikan di negeri ini sebagai upaya sungguh-sungguh menciptakan warga negara yang baik. Dan pendidikan yang berkarakter adalah bagian penting untuk menciptakan kondisi demikian. Dengan demikian, pendidikan yang berkarakter akhirnya akan dapat melahirkan generasi bangsa yang berakal cerdas dan berhati mulia sekaligus loyal sebagai warga negara. (yus)

Artikel Ironi pada Masa Pandemi

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jatim.nu.or.id

Internet Source

4%

2

fliphtml5.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words